

## Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular Sebagai Sarana Diplomasi Indonesia Secara Global

**Jerry Indrawan<sup>1</sup> Ganis Purnaningtyas<sup>2</sup> Dede Suprayitno<sup>3</sup>**

Program Studi Ilmu Politik, FISIP UPN Veteran Jakarta, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia<sup>1</sup>

Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan, FEB UPN Veteran Jakarta, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP UPN Veteran Jakarta, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia<sup>3</sup>

Email: [jerry.indrawan@upnvj.ac.id](mailto:jerry.indrawan@upnvj.ac.id)<sup>1</sup> [ganispurnaningtyas@gmail.com](mailto:ganispurnaningtyas@gmail.com)<sup>2</sup>  
[dedesuprayitno@upnvj.ac.id](mailto:dedesuprayitno@upnvj.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstract

Since the 1955 Asian-African Conference (AAC), Indonesia has been actively involved in South South Triangular Cooperation (SSTC) which serves as a catalyst for political movements in international cooperation because it helps exchange resources and knowledge according to the needs of developing countries. Indonesia has a dual role as a recipient and giver of assistance in SSTC. This study aims to answer issues related to the implementation of SSTC in the Indonesian context. The research method used is descriptive research with a qualitative approach and the data collected by literature study. The results showed that in terms of Indonesia's interests, SSTC helps achieve utilization in bilateral trade and becomes a forum for sharing experiences and encouraging other countries to apply democratic principles. Indonesia provides financial and non-financial support, but is more likely to be in non-financial form. Relevance in this era, the impact of SSTC will be a powerful instrument to reduce dependence on superpowers. SSTC is considered suitable and beneficial for sustainable development, both from an economic, socio-cultural, and political security perspective. Limited capital is the biggest obstacle for SSTC member countries, especially during the outbreak of the Covid-19 pandemic.

**Keywords:** SSTC, Development, G-20 Forum, International Relations



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### INTRODUCTION

Indonesia terlibat dalam kerja sama internasional dalam berbagai tingkatan, termasuk perdagangan bilateral dengan Filipina, kerjasama multilateral melalui keanggotaan dalam G-20, dan dalam bentuk kerjasama regional dengan keanggotaannya di ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), dimana ini merupakan upaya untuk mendukung pembangunan nasional. Dari jumlah anggota keseluruhan sebanyak 20 negara saja telah mendominasi lebih dari 80 persen ekonomi dunia, yang ditentukan oleh pertumbuhan GNP, aliran populasi, perdagangan ekspor-impor di dunia, investasi asing, dan pasar internasional. Asumsinya, jika ekonomi ke-20 negara anggota tersebut sehat, ekonomi seluruh dunia juga akan sehat. Oleh karena itu, pengaruh yang sistematis, positif, dan signifikan akan dirasakan organisasi ekonomi dunia dan juga negara-negara lain yang belum termasuk dalam anggota G-20 dari keberhasilan forum ini. Ekonomi yang mengalami pertumbuhan di 20 negara anggota tersebut nantinya akan memberikan pula negara lainnya pertumbuhan yang stabil (Hermawan, 2014).

Sejak G-20 berdiri pada tahun 1999, Indonesia telah berpartisipasi dalam forum eksklusif ini, dimana merupakan tempat bagi Indonesia untuk dapat memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Indonesia bagaimanapun mengetahui bahwa perwakilan dari negara-negara berkembang adalah posisi strategis dan tanggung jawabnya yang harus diemban. Pertama, Indonesia merupakan salah satu diantara negara berkembang lainnya yang memiliki

pertumbuhan ekonomi yang mengesankan. Kedua, Indonesia bersama dengan Cina, Amerika Serikat dan India termasuk ke dalam empat besar negara dengan jumlah penduduk terbanyak. Ketiga, Indonesia menjadi bagian dari anggota negara demokrasi, sehingga perannya dapat menginspirasi negara lain untuk menciptakan dan mempertahankan ekonomi dengan pertumbuhan tinggi, serta memajukan demokrasi. Keempat, Indonesia menjadi satu-satunya anggota tetap G-20 yang berasal dari anggota ASEAN, dan hal ini memiliki arti penting secara geografis. Memang benar di masa lalu Indonesia menjadi satu di antara banyaknya negara berkembang yang pernah mengalami krisis ekonomi yang melemahkan, namun kini Indonesia dengan relatif baik telah berhasil mengatasi permasalahan tersebut sehingga dapat bergabung dengan G-20 (Kumar, n.d).

Namun, pola Utara-Selatan menimbulkan ketimpangan dalam dinamika kerjasama internasional antara negara berkembang dan negara maju, sehingga negara berkembang selalu dipandang sebagai minoritas. Kegiatan pemberian bantuan (aid) kepada negara berkembang dari negara maju dipandang merupakan tindakan yang sederhana sehingga dianggap sebagai pola kerjasama Utara-Selatan yang kurang jelas. Untuk itu, Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular (KSST) dibentuk sebagai kerangka kerjasama internasional yang baru. KSST merupakan dua kerangka kerjasama internasional yang digabung atau disatukan, yaitu Kerjasama Selatan Selatan (KSS) dan Kerjasama Triangular. KSS melibatkan kerjasama dalam hal sumber daya, pembangunan, dan pertukaran pengetahuan baik itu pada bidang sosial, ekonomi, politik, teknis, serta budaya antara dua atau lebih negara berkembang. Kemudian bentuk kerjasama yang melibatkan negara maju selaku pihak ketiga di antara dua atau lebih negara berkembang merupakan pemahaman dari Kerjasama Triangular.

Sejak Konferensi Asia-Afrika (KAA) pertama pada tahun 1955, Indonesia telah terlibat aktif dalam Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular (KSST) yang berfungsi sebagai katalisator pergerakan politik dalam kerjasama internasional antara negara-negara dunia ketiga, dikarenakan membantu dalam mencapai pertukaran sumber daya dan pengetahuan yang paling sesuai dengan kebutuhan negara berkembang. Dengan Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah atau middle income country, peran dan posisi Indonesia dalam KSST semakin diperkuat. Indonesia merupakan negara penerima (recipient) sekaligus pemasok. Indonesia juga menggunakan KSST untuk memasuki pasar global barang dan jasa dari lokal dalam rangka diplomasi ekonomi dan investasi politik. Oleh karena itu, untuk berperan aktif dalam KSST Indonesia sudah memiliki sumber daya dasar sebagai modal melalui politik bebas aktif yang menjadikannya landasan politik luar negeri dan sumber daya kunci keberhasilan Indonesia di kancah internasional dalam menjalin serta mengembangkan hubungan kerjasama. Hal tersebut juga telah dibuktikan melalui peluang hubungan baik yang meningkat dengan berbagai negara.

Menurut penulis, dengan Indonesia yang masuk dalam keanggotaan G-20, semakin penting dirasa untuk terus melakukan pengembangan terhadap KSST. Seperti yang sudah dibahas bahwa di dalam KSST peran yang dipegang oleh Indonesia mengalami perubahan ke peran ganda dimana tidak hanya lagi menjadi penerima, namun juga menjadi pemberi bantuan di antara beberapa negara lainnya atau yang disebut sebagai "new emerging donors". Hal ini sejalan dengan meningkatnya status negara tersebut menjadi "negara berpenghasilan menengah". Pembangunan sebagai kepentingan kolektif dalam forum G-20 menjadi isu yang perlu diperhatikan dan diimplementasikan oleh Indonesia selaku anggotanya.

Indonesia sebenarnya telah memberikan bantuan pembangunan kepada negara berkembang lainnya melalui skema KSST sebagaimana yang telah disebutkan. Dengan demikian, perwujudan kepentingan kolektif (mutual interest) yang ada pada forum G-20 telah dilakukan Indonesia secara aktif. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan-penjelasan yang

telah dipaparkan, penulis membahas isu-isu terkait kepentingan Indonesia dalam KSST, peran dan bantuan yang diberikan Indonesia, dampak dan keuntungan signifikan bagi negara penerima, serta potensi dan tantangan implementasi KSST saat pandemi covid-19.

## KERANGKA TEORI

Setiap peneliti dan organisasi memberikan definisi Kerjasama Selatan Selatan (KSS) yang berbeda dalam publikasi mereka, sehingga tidak ada definisi yang seragam tentang KSS. Dapat dipahami bahwa KSS secara sederhananya merupakan kemitraan yang membantu dalam memfasilitasi pembangunan antara dua atau lebih negara berkembang. Secara singkat penggambaran KSS oleh Kakonge yaitu sebagai kemitraan antara negara-negara berkembang. Lebih jelasnya, definisi KSS menurut Kakonge (2014) adalah suatu proses kerjasama dengan memanfaatkan pertukaran sumber daya, keterampilan, kemampuan teknis, dan pengetahuan demi mencapai tujuan pembangunan kolektif dan individu antara dua atau lebih negara berkembang (Rozy, 2020).

Meskipun memiliki perbedaan dengan KSS yang tidak melibatkan tiga negara atau lebih, Kerjasama Triangular melibatkannya — dan bukan hanya negara berkembang atau negara selatan yang dilibatkan, namun juga negara maju atau negara utara serta lembaga multilateral, yakni organisasi internasional atau lembaga donor seperti halnya PBB. Masing-masing dari ketiga pihak ini dalam hubungan kerjasama memiliki posisi dan peran yang berbeda-beda. Melalui lembaga multilateral dan lembaga donornya, negara-negara maju atau negara utara hanya bertindak sebagai pendukung. Sedangkan negara-negara berkembang atau negara selatan yang masih harus memprakarsai dalam melakukan inisiatif untuk bekerja sama. Aliansi lembaga multilateral, negara maju, dan negara berkembang inilah yang disebut dengan Kerjasama Triangular (Rozy, 2020).

Penulis dalam jurnal ini menerapkan teori kebijakan luar negeri untuk lebih memahami konteks KSST. Terdapat instrumen penting untuk membantu mengejar kepentingan nasional dalam suatu negara. Instrumen yang dianggap penting tersebut adalah pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Berdasarkan dari pendapat yang dikemukakan oleh Bojang (2018) menyatakan kebijakan luar negeri dapat dibagi menjadi tiga bagian, yakni bagian akhir, jalan, dan cara. Bagian akhir harus berisi visi tentang kepentingan-kepentingan dan tujuan pencapaian hasil dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Bagian jalan berisi rangkaian ide dan strategi untuk mewujudkan capaian tujuan dan kepentingan tersebut, serta bagian cara berisi jumlah yang tersedia dari jenis sumber daya di negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri adalah tindakan yang sesuai dengan konvergensi politik internasional dan domestik. Dengan begitu, kekuatan domestik (internal) dan kekuatan internasional (eksternal) merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri (Paramita, 2019).

Suatu negara seringkali menganalisis dan menjelaskan kebijakan luar negeri dengan menggunakan konsep kepentingan nasional, dan terkadang juga dalam lingkup internasional digunakan untuk merasionalisasikan dan membenarkan perilaku negara tersebut (Burchill, 2005). Pengategorian kepentingan luar negeri didasarkan pada karakteristik obyektif dan subyektif. Kepentingan faktor etnis, sejarah, geografi, populasi, dan sumber daya suatu negara yang menjadi tujuan utama kebijakan luar negeri merupakan definisi dari kepentingan obyektif nasional. Sedangkan identitas, agama, dan ideologi yang didasarkan pada preferensi pembuat kebijakan dan pemerintah adalah pengertian kepentingan subyektif nasional (Frankel, 1970).

Konsep kerjasama internasional lahir dari kepentingan nasional tersebut, dan menjadi bagian dari kebijakan luar negeri. Dalam buku "Contending Theories of International

Relations” sebagaimana yang dijelaskan oleh Dougherty & Pfaltzgraff (1986) bahwa “kehidupan internasional yang mencakup berbagai sektor seperti lingkungan hidup, ekonomi, politik, sosial budaya, ideologi, serta pertahanan dan keamanan menjadi sebab munculnya kerjasama internasional. Masalah yang beragam ini telah menyebabkan terbentuknya aliansi internasional antara negara- negara yang berasal dari seluruh dunia” (Bramasta, 2020).

Jenis kerjasama internasional dapat dilakukan dalam bentuk konsep bantuan luar negeri lain. Bantuan luar negeri menurut Williams (2015), adalah pengiriman dari suatu organisasi atau negara ke negara lainnya dalam bentuk barang, jasa, maupun modal internasional demi kepentingan penduduk dan negara tersebut. Bentuk lain dari bantuan yang diberikan dapat berupa pengangkutan dan pengiriman pelatihan, nasehat teknis, komoditas, maupun sumber daya (Bramasta, 2020). Bantuan luar negeri yang diberikan dari suatu negara ke negara lain akan membantu dalam proses pembangunan negara. Proses pembangunan negara juga dipengaruhi oleh sumber daya alam dan pembangunan ekonomi yang ada di negara tersebut. Kemudian faktor melimpahnya sumber daya alam seperti air, minyak mentah atau minyak bumi, gas, serta mineral berperan penting dalam kebijakan luar negeri suatu negara berkaitan dengan politik internasional, meskipun memiliki ukuran yang kecil (Paramita, 2019).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan tersebut paling sesuai dengan kompleksitas masalah dalam latar belakang yang dipecahkan dengan mencoba menjawab pertanyaan penelitian tentang isu-isu terkait pengimplementasian Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular (KSST). Rumusan masalah dapat digambarkan melalui hasil penelitian yang sistematis karena penelitian ini bersifat deskriptif. Untuk memperoleh kebutuhan data, penelitian dalam jurnal ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif, yang meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan yang berasal dari data statistik, referensi buku, jurnal online, serta website lainnya. Sedangkan data dari website resmi oleh pemerintah dijadikan sumber dalam memperoleh dan mengumpulkan data primer.

## **HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI**

### **Keuntungan Indonesia dalam KSST**

Dalam tulisan ini, fokus kepentingan yang dimiliki Indonesia terbagi menjadi dua kelompok, bukan hanya semata kepentingan nasional (insiders) saja tetapi juga kepentingan bagi negara lain (outsiders). Hubungan baik akan terjalin antara Indonesia dengan negara lain sebagai penerima melalui bantuan luar negeri yang diberikannya. Indonesia menargetkan beberapa negara tersebut sebagai pasar non tradisionalnya. Maksudnya di sini, sebelumnya perdagangan internasional Indonesia belum memprioritaskan negara tersebut seperti pasar ke negara maju dikarenakan belum menjalin hubungan kemitraan. Pemanfaatan dalam perdagangan bilateral melalui peningkatan hubungan baik dengan negara penerima bantuan juga dapat terwujud melalui KSST. Misalnya ketika Indonesia menawarkan bantuan kepada negara berkembang yang memiliki potensi perekonomian akan maju seperti Afrika. Afrika telah lebih berkembang di bidang ekonomi (Tuwo, 2014). Grafik dari segi nilai dan volume ekspor Indonesia memiliki tren menanjak terhadap pasar non tradisionalnya walaupun nilainya terbilang kecil (Burmansyah, 2016).

Selain perdagangan, menurut penulis KSST dapat menjadi wadah bagi Indonesia untuk berbagi pengalaman dalam berdemokrasi dan mendorong negara-negara anggota lainnya untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dengan pengambilan langkah serius. Demokrasi formal, baik melalui pemilu daerah maupun nasional, terbukti efektif dalam

membangun stabilitas politik. Indonesia telah mendorong demokratisasi di berbagai tingkat daerah dan nasional secara konsisten, seperti yang ditunjukkan oleh hak berserikat, berpendapat, dan kebebasan pers. Namun walaupun begitu, tidak semua aspek demokrasi di Indonesia telah “tepat dan optimal” dalam tatanan ideal.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah isu universal yang perlu diperhatikan oleh Indonesia dalam rangka mempromosikan HAM secara global, dengan isu demokrasi menjadi pendampingnya. Isu pelanggaran HAM dan kekerasan politik yang bersinggungan dengan isu demokrasi tersebut, terutama yang terjadi di negara KSST tidak dapat dihindari dan diabaikan oleh Indonesia sebagai warga dunia. Usaha untuk mewujudkan perdamaian dunia merupakan tugas dan tanggung jawab yang harus diemban oleh Indonesia secara konstitusional (Sari & Wibowo, 2023).

Dampak juga dirasakan dari pengaruh adanya dinamika lingkungan strategis terhadap hasil ekonomi, keamanan, dan politik negara-negara KSST di tingkat dunia dan regional (Aisyah, et. al., 2021). Oleh karena itu, cakupan pandangan strategi global terkait bidang isu prioritas dan juga pengaruh langsung yang diberikan dari kawasan atau negara terhadap kepentingan nasional sangat penting untuk Indonesia (Santoso, et. al., 2023). Dengan kata lain, menjadi hal penting mengetahui kontribusi yang diberikan sebagai solusi penyelesaian isu dan manfaat yang didapatkan bagi Indonesia dan kawasan atau negara tersebut.

Kebijakan luar negeri terkait diplomasi dan politik Indonesia harus berpijak pada tiga prinsip dasar, yaitu demokrasi dan hak asasi manusia terlebih dahulu (Anggraeni & Indrawati, 2020), inklusi dan pembangunan berkelanjutan adalah prioritas kedua (Situmorang, 2015), serta penelitian dan pengembangan (Hutabarat, 2022) adalah prioritas ketiga sesuai dengan visi dan misi pemerintah Indonesia saat ini. Semua negara dalam konteks KSST harus bersatu untuk memastikan bahwa unsur-unsur demokrasi dan hak asasi manusia dilaksanakan secara efektif di tingkat nasional, baik dengan membentuk lembaga-lembaga hak asasi manusia, maupun dengan memastikan demokrasi prosedural di masing-masing negara (Tamisari, 2017).

Dengan mengidentifikasi potensi perdamaian yang ada dan memanfaatkan pengalaman berbagai negara di Asia dan Afrika, pendekatan transformasi konflik dapat digunakan untuk memperkuat KSST dalam mencapai perdamaian dan kemakmuran dunia. Makna perdamaian yang dinilai sebagai suatu kondisi adanya persaingan yang sehat dengan tanpa adanya unsur kekerasan di dalam ruangnya dapat terwujud apabila terjadi perubahan ke arah kerjasama mutualisme dari kekerasan dan potensi yang menimbulkannya. Pada saat yang sama, pengentasan kemiskinan dan pelaksanaan pembangunan dapat dicapai dengan mengatasi faktor alam, budaya, dan struktural. Dalam mendukung hubungan kerjasama pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, kebijakan dan program dapat ditentukan secara struktural dengan mempertimbangkan kekhususan suatu kawasan, negara, atau wilayah baik dari sisi sumber daya ekonomi, demografi, geografi (alam), serta sosial budayanya.

### **Peran dan Bantuan yang Diberikan Indonesia**

Sejak tahun 2010, Indonesia kembali menegaskan dukungannya terhadap KSST dengan memasukkan KSS dalam RPJMN, agar lebih menunjukkan bahwa partisipasi Indonesia dalam forum kerjasama pembangunan internasional semakin diperkuat (Abdurachman & Prakoso, 2017). Dalam KSST, Indonesia memberikan bantuan dana dengan jumlah yang paling kecil yaitu sebesar US\$ 10 juta dibandingkan negara-negara lainnya yang menyumbang bahkan hingga beratus-ratus juta seperti India, Brazil, dan Tiongkok (Pujayanti, 2015). Sehingga, kecenderungan bantuan dalam bentuk dukungan non-finansial diberikan oleh Indonesia. Jenis bantuan yang dimaksud mirip dengan bantuan untuk program-program yang memiliki

kepentingan nasional di negara lain dan memiliki ciri khas dari segi politik dan citra yang saat itu menunjukkan posisi Indonesia sebagai satu-satunya perwakilan yang berasal dari negara ASEAN dengan menjadi anggota tetap G-20 (Abdurachman & Prakoso, 2017).

Dukungan finansial dalam bentuk hibah atau hadiah dan berbagai pelatihan tenaga kerja juga diberikan oleh Indonesia bekerja sama dengan KSST kepada anggota dari kerjasama itu sendiri, seperti pelatihan ahli di bidang UMKM, good government, perikanan, dan pertanian. Menurut Laporan Tahunan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) Indonesia Tahun 2016, pemerintah telah menganggarkan dana bantuan senilai US\$ 15,08 juta di tahun tersebut. Negara juga telah menyediakan lebih dari 700 program kerjasama dengan dana sebesar \$49,8 jutasejak tahun 2006. Selama periode 2011-2015, Indonesia bertanggung jawab atas 405 program capacity building bagi 91 negara berkembang dengan jumlah peserta 4.402 orang (Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri Indonesia, 2015).

Pembangunan, Good Governance, dan Ekonomi menjadi program prioritas utama atau unggulan negara, sedangkan Gender dan Keluarga Berencana, Kesehatan, Infrastruktur, Manajemen Risiko, Industri, Kelautan, dan Perikanan merupakan bagian kecil bidang kegiatan yang dibentuk untuk penyaluran program pembangunan KSST dari Indonesia di tahun 2020. Dalam upaya pembangunan bangsa, peningkatan di negara-negara Selatan dalam hal kapasitas dan pengetahuan menjadi tujuan dari setiap kegiatan yang dirancang tersebut. Filipina ditargetkan secara khusus untuk bantuan teknis Indonesia dari perspektif negara yang menjadi prioritas di tahun yang sama. Berikut ini merupakan pendistribusian dari jenis program KSST pada tahun 2020 oleh Indonesia (Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Indonesia, 2022).

**Gambar 1. Persentase Program Unggulan dalam Penyaluran Program KSST Indonesia Tahun 2020**



Sumber: Laporan Tahunan KSST Indonesia, 2020

**Gambar 2. Persentase Penyaluran Program KSST Indonesia Berdasarkan Sektor Tahun 2020**



Sumber: Laporan Tahunan KSST Indonesia, 2020

Adapun penulis mengutip dari Laporan Tahunan KSST tahun 2020 oleh Indonesia, pelaksanaan program unggulan yang dimaksud dalam KSST dari pemerintah negara yakni

Dukungan FDA Indonesia untuk Pembentukan Otoritas Makanan dan Obat Palestina yang Independen; Program Berbagi Pengetahuan BukuKIA: Berbagi Pengalaman dan Pembelajaran Pelaksanaan Buku KIA di Era Pandemi Covid-19; Webinar Internasional tentang Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kontribusinya pada Program Kerjasama Pembangunan Internasional Indonesia; Pelatihan Impact Based Forecast (IBF) Indonesia WMO Regional Training Center (Ina-RTC) Untuk Negara Anggota Regional Association (RA) V WMO; Proyek "ACCESS" Mempercepat Akses Energi Bersih untuk Mengurangi Ketimpangan; Webinar KSST tentang Kemitraan Strategis dengan Tokoh Agama Islam dalam Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi dan Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perkawinan Anak; Pelatihan Online Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular (KSST) tentang Kesehatan Reproduksi, Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi Remaja dan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender dan Perkawinan Anak untuk Pemimpin Muslim Daerah Otonom Bangsamoro Muslim Mindanao; Pelatihan Keterampilan Taktis FPU dan Studi Banding Forensik, Investigasi Cyber-Crime, Perlindungan VVIP dan Manajemen NCB-Interpol; Program Berbagi Pengetahuan tentang Peningkatan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; dan Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular dalam Pengembangan Akuakultur – Indonesia-Maroko-IsDB (Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Indonesia, 2022)

### **Dampak dan Keuntungan Signifikan Bagi Negara Penerima**

Dalam KSST, negara anggota diminta untuk berpartisipasi dalam pencapaian sejumlah visi dan misi organisasi tersebut, maka dari itu kesetaraan untuk mereka dapat dicapai dalam bentuk keseimbangan kontribusi dan tanggung jawab. Dari awal perencanaan hingga panen hasil, negara-negara anggota KSST mengambil alih manajemen bersama, yang mengarah pada kolaborasi yang stabil dan harmonis dengan keuntungan merata, saling percaya, bibit solidaritas, dan perlakuan yang sama untuk semua anggota. Cakupan seluruh unsur maupun komponen atau inklusivitas merupakan hasil dari relevansi selanjutnya. Sejak kerjasama dilakukan, beberapa pihak terlibat dalam pelaksanaannya, antara lain masyarakat sampai pemerintah, ataupun prinsip yang berpusat pada rakyat.

Kondisi tersebut berelevansi dengan situasi sekarang ini dimana negara yang berstatus maju seringkali mengeksploitasi negara lain yang berstatus berkembang atau negara dunia ketiga yaitu negara-negara selatan dengan alasan agar pembangunan dapat lebih terdorong maju melalui tingginya tingkat ekonomi yang dimonopoli dan penerapan tarif, serta kesensitifan terkait intervensi politik. Kenyataannya ini merupakan sebuah strategi yang dilakukan negara maju terhadap negara berkembang untuk mengeksploitasi sumber daya mereka. Oleh karena itu, jika kerjasama ini dipupuk di era sekarang, akan menjadi instrumen yang ampuh untuk mengurangi ketergantungan pada negara-negara adidaya atau negara maju.

Dalam segi ekonomi, Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular (KSST) ini dikatakan mampu memicu pembangunan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan inti dari KSST itu sendiri dimana ketergantungan terhadap negara maju dapat diminimalkan, melalui pengupayaan jangka panjang bagi negara berkembang agar dapat melakukan proyek pemberdayaan dan kegiatan dalam negeri secara mandiri untuk membantu kapasitas dari negara tersebut mengalami peningkatan (Nurhayati, et al., 2019).

### **Potensi dan Tantangan Implementasi KSST Saat Pandemi Covid-19**

Karena memiliki dampak yang efektif pada berbagai aspek suatu negara, Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) dianggap cocok dan bermanfaat untuk pembangunan

lebih lanjut, baik itu dari perspektif ekonomi, sosial budaya, dan keamanan politik. Dalam perspektif ekonomi, kerjasama ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan pembangunan ekonomi nasional dengan memperluas investasi, akses pasar, dan perdagangan di negara yang terlibat. Selain itu juga dapat digunakan sebagai alat untuk membantu suatu negara dalam mencapai tujuan pembangunan nasionalnya melalui diplomasi ekonomi.

Dalam perspektif sosial budaya, penulis berpendapat melalui program pertukaran pengetahuan melalui kerjasama tersebut akan memberikan peningkatan terhadap negara-negara yang bersangkutan termasuk Indonesia dalam hal kapasitas, serta nilai luhur dan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu dapat lebih diperkenalkan ke berbagai negara di dunia. Hal ini kemudian dapat menjadi salah satu cara untuk mengangkat profil budaya Indonesia di kancah internasional sebagai sebuah negara yang dapat memberikan kontribusi aktif berdasarkan solidaritas, dan pada akhirnya sebagai negara yang mampu membina hubungan baik antar bangsa sehingga masing-masingnya saling memahami budaya yang berkembang di antara masyarakat suatu negara. Dari perspektif politik dan keamanan, terlihat bahwa suatu negara di berbagai belahan dunia dapat menjadikan kerjasama ini sebagai wadah diplomasi politik serta akan berpengaruh terhadap pertahanan dan keamanan nasional yang tercipta secara positif akibat amannya tatanan dunia.

Selain banyaknya implikasi positif bagi perekonomian Indonesia yang dihasilkan dari keberadaan KSST, tampaknya pemerintah dan seluruh jajaran yang terlibat dalam kerjasama ini telah memasuki tingkat kesulitan yang baru daripada tahapan sebelumnya. Sebelumnya, kendala terbatas hanya pada isu perubahan iklim, perdagangan global, serta keterbatasan modal yang jika tidak segera disikapi dengan cepat, maka akan membuat kerjasama timpang. Masyarakat Internasional di berbagai belahan dunia dihadapkan pada pandemi Covid-19 sebagai tantangan serius dalam dua tahun terakhir, dimana terdapat paksaan pemberhentian seluruh operasi dalam interaksi hubungan internasional dan pada dasarnya ini dijuluki "The Worst of The Worst". Kehadiran Covid-19, bagaimanapun, tidak hanya mengubah masalah lama, namun nyatanya semua masalah lama itu masih ada dan berkembang menjadi lebih buruk karena pandemi ini.

Sebagai negara yang masih dalam proses berkembang atau yang berstatus "Developing Country", kekurangan modal menjadi kendala terbesar dan utama bagi negara-negara anggota KSST, karena merupakan senjata utama dalam melakukan kerjasama. Bahkan Indonesia pun menghadapi masalah terkait sumber modal yang terbatas. Indonesia memberikan dana kurang lebih sekitar US\$ 10 juta pada tahun 2010 sebagai partisipasi aktifnya dalam berbagai program bantuan dan kerjasama di lingkup KSST. Namun, jumlah tersebut hanya sebagian kecil dari apa yang dapat ditawarkan oleh Afrika Selatan, Brazil, India, dan Cina pada periode yang samadengan memberikan kontribusi masing-masing sebesar US\$ 118 juta, US\$ 500 juta, US\$ 649 juta, dan US\$ 2 miliar (Pujayanti, 2015).

Hal ini ditambah lagi dengan merebaknya pandemi di sejumlah negara yang ada di dunia, sehingga mempersulit negara-negara tersebut untuk bergerak dan mencari sumber modal serta pendapatan. Pandemi Covid-19 berdampak kuat pada laju pertumbuhan ekonomi di banyak negara, tidak hanya negara-negara emerging market seperti Indonesia, tetapi juga negara-negara berpenghasilan tinggi dan maju. Efek dari penyebaran pandemi di seluruh negeri membuat Bank Dunia harus mempertimbangkan kembali proses klasifikasinya berdasarkan faktor tersebut. Pandemi ini dapat berdampak buruk bagi kerjasama KSST karena bukan hanya Indonesia yang mengalami kemunduran status dari upper middle income menjadi lower middle income beberapa tahun kebelakang tetapi krisis ekonomi yang juga dialami negara lain, sehingga pengurangan modal negara akan menjadi salah satu akibatnya. Modal negara yang semakin berkurang dan sulit diperoleh tidak akan membawa



keuntungan bagi negara manapun dalam kerjasama tersebut, karena sebagian besar anggota KSST pada dasarnya adalah negara berkembang dengan keterbatasan modal dan ekonomi yang belum maju.

## KESIMPULAN

Sejak Konferensi Asia-Afrika (KAA) pertama pada tahun 1955, Indonesia telah terlibat aktif dalam Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular (KSST) yang berfungsi sebagai katalisator pergerakan politik dalam kerjasama internasional antara negara-negara dunia ketiga, dikarenakan membantu pertukaran sumber daya dan pengetahuan yang paling sesuai dengan kebutuhan negara berkembang. Dengan Indonesia yang masuk dalam keanggotaan G-20, semakin penting dirasa untuk terus melakukan pengembangan terhadap KSST. Dalam KSST, peran yang dipegang oleh Indonesia mengalami perubahan ke peran ganda, tidak hanya lagi menjadi penerima, namun juga menjadi pemberi bantuan. Hal ini sejalan dengan meningkatnya status negara tersebut menjadi “negara berpenghasilan menengah”.

Dari segi kepentingan Indonesia, pemanfaatan dalam perdagangan bilateral melalui peningkatan hubungan baik dengan negara penerima bantuan dapat terwujud melalui KSST. Selain perdagangan, KSST dapat menjadi wadah untuk berbagi pengalaman dalam berdemokrasi dan mendorong negara-negara anggota lainnya untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dengan pengambilan langkah yang serius. Dalam kerjasama tersebut, Indonesia memberikan bantuan dana dengan jumlah yang paling kecil. Sehingga, kecenderungan bantuan dalam bentuk dukungan non-finansial diberikan oleh Indonesia. Dukungan finansial dalam bentuk hibah atau hadiah dan berbagai pelatihan tenaga kerja juga diberikan oleh Indonesia bekerja sama dengan KSST. Jika kerjasama ini dipupuk di era sekarang, dampaknya bagi negara penerima bantuan akan menjadi instrumen yang ampuh untuk mengurangi ketergantungan pada negara-negara adidaya atau negara maju. Karena memiliki dampak yang efektif pada berbagai aspek suatu negara, KSST dianggap cocok dan bermanfaat untuk pembangunan lebih lanjut, baik itu dari perspektif ekonomi, sosial budaya, dan keamanan politik. Sebagai negara yang masih dalam proses berkembang, kekurangan modal menjadi kendala terbesar bagi negara-negara anggota KSST terutama ketika merebaknya pandemi Covid-19, karena merupakan senjata utama dalam melakukan kerjasama tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurachman, B., & Prakoso, B. M. (2017). Peran Indonesia dalam Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular. *Jurnal Transborders*, 1(1), 20-34.
- Aisyah, A. A., Ardiawan, & Bachtiar, F. R. (2021). Menilik Tantangan dan Potensi Kerjasama Selatan-Selatan Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Era (Pasca) Covid-19. *Review of International Relations*, 3(2), 166.
- Anggraeni, Y., & Indrawati, I. (2020). Diplomasi Publik Indonesia Melalui Bali Democracy Forum Sebagai Bagian Dari Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia. *Global Insight Journal*, 5(1), 39–58. <https://doi.org/10.52447/gij.v5i1.3732>
- Apresian, S. R. (2016). Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular Sebagai Instrumen Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Global. *JlHI: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 12(2), 189-203.
- Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri Indonesia. (2015). *Kajian Mandiri Reorientasi Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular bagi Kepentingan Nasional*.

- Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Indonesia. (2022). Laporan Tahunan Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular Indonesia. From Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Indonesia: [https://ktln.setneg.go.id/pdf/ktss/AR\\_KTSS\\_2020\\_eng.pdf](https://ktln.setneg.go.id/pdf/ktss/AR_KTSS_2020_eng.pdf)
- Bojang, A.S. (2018). The Study of Foreign Policy in International Relations. *Journal of Political Sciences & Public Affairs*, 6(4), 1-9.
- Bramasta, B. (2020). Peran Indonesia sebagai Pemberi Bantuan melalui KSST bagi Negara Pasifik 2015-2019. *Global & Policy*, 8(1), 107-120.
- Burchill, S. (2005). *The National Interest in International Relations Theory*. London: Palgrave Macmillan.
- Burmansyah, E. (2016). Mendorong Pembentukan Pakta Perdagangan Selatan-Selatan. From IndoProgress: <https://indoprogress.com/2016/01/mendorong-pembentukan-pakta-perdagangan-selatan-selatan/>
- Dougherty, J. E., & Pfaltzgraff, R. L. (1986). *Contending Theories of International Relation*. New York: Harper & Row.
- Dzikri, N. (2020). Kontribusi Indonesia Dalam Hubungan South-South Cooperation Periode 2016-2018. *Indonesian Journal of International Relations*, 4(2), 164-186.
- Frankel, J. (1970). *National Interest*. London: Pall Mall Press Ltd.
- Hermawan, Y. P. (2014). Analisis pengembangan model south-south and triangular cooperation dalam penyediaan bantuan pembangunan luar negeri (official development assistance/ODA) oleh Indonesia sebagai emerging economy dalam forum G-20. Bandung: Universitas Katholik Parahyangan.
- Hutabarat, G. F. I. (2022). Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pasca Perang Rusia-Ukraina Berdasarkan Perspektif National Interest. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 3(3), 154. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v3i3.1323>
- Kumar, Z. (n.d). Masih Relevankah G20 untuk Indonesia. From Academia.edu: <https://www.academia.edu/9628653>
- Mahalia, Z. (2022). Peran Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia Sebagai Instrumen Diplomasi Indonesia ke Southern Partners. *Medialog: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1), 95-106.
- Nurhayati, R. T., Pramadha, R. A., Wijanarko, D. A., Nurshafira, T., Wulansari, H. Y., & Bimantara, A. (2019). Relevansi Kerja Sama Selatan-selatan dengan Kebijakan Nasional Indonesia: Sebuah Kerangka Monitoring dan Evaluasi.
- Paramita, R. (2019). Dinamika Kebijakan Keterlibatan Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) Periode 2004-2018. *Polistaat: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(1), 38-56.
- Pujayanti, A. (2015). *Kerjasama Selatan-Selatan dan Manfaatnya bagi Indonesia*. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Rachmawaty, A., Rachmaliani, A., & Rizaldi, A. (2019). Dampak Bantuan Indonesia terhadap Negara Anggota Kerja Sama Selatan-Selatan di Kawasan Asia. *Mandala: Jurnal Hubungan Internasional*, 2(1), 80-95.
- Redaksi Website. (2015). *Konferensi Asia Afrika: Makna Simbolik dan Kontribusi Indonesia bagi Perdamaian Dunia*.
- Rozy, F. (2020). Dukungan dan Implementasi South-South Cooperation Indonesia dalam Meningkatkan Pertumbuhan Negara Berkembang. *JDIS: Journal of Diplomacy and International Studies*, 3(1), 93-104.
- Santoso, G., Abdulkarim, A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023). Kajian Ketahanan Nasional melalui Geopolitik dan Geostrategi Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 184-196

- Sari, A. A., & Wibowo, A. (2023). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menegaskan Sistem Pendidikan Nasional Dalam Rangka Konstitusi. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2), 29–37.
- Situmorang, M. (2015). Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 11(1).
- Tamisari, F. (2017). Diplomasi dan Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Upaya Menghadapi Masalah Global Terkait Kelompok Militan Isis. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, VII(1), 31–46.
- Tuwo, A. G. (2014). Sudah Untungkah Indonesia Beri Bantuan ke Afrika?
- Williams, V. (2015). *Foreign Aid*.